

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

a. Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Dalam suatu implementasi kebijakan harus melibatkan banyak pihak, diantaranya pemerintah daerah, dinas pariwisata, stake holder terkait dan masyarakat sebagai penerima sekaligus pelaksana implementasi kebijakan tersebut. Disini tidak hanya *policy making* yang berperan penting, tetapi juga partisipasi masyarakat. Dalam Undang - Undang nomor 9 tahun 1990 Peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan tersebut adalah masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan dan dalam rangka proses pengambilan keputusan, Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat melalui penyampaian saran, pendapat, dan pertimbangan. Harapan dengan kebijakan konservasi yang bersinergi dengan pariwisata maka pemeliharaan bangunan kota lama dapat terpelihara dengan adanya kegiatan pariwisata yang memperoleh pemasukan ekonomi, dan dari kegiatan pariwisata juga pelestarian bangunan tetap terpelihara sebagai warisan yang perlu dilestarikan.

b. Pengembangan Kerjasama Dengan Stake holder

Pengembangan kerjasama dengan para pelaku bisnis atau usaha merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh dinas dimana upaya untuk memberikan dukungan terkait dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah selalu memberikan suatu jaminan bahwa segala bentuk kebijakan yang telah ditetapkan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan adanya persamaan misi dan visi sehingga segala bentuk program yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

c. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik terjadi ketika aktivitas atau kegiatan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. Kondisi ini menjadi suatu tolak ukur atas keberhasilan program pariwisata yang ditetapkan oleh dinas sehingga memberikan dukungan dalam upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Secara ekonomi adanya peningkatan pariwisata akan memberikan suatu bentuk dukungan terhadap kondisi ekonomi yang dimiliki oleh daerah sehingga adanya jaminan atas tata kelola ekonomi yang lebih baik atas terjadinya peningkatan perekonomian.

Dengan demikian peningkatan secara ekonomi secara maksimal dirasakan oleh masyarakat yang terdapat disekitar tempat wisata, dimana bentuk-bentuk usaha yang mendukung secara perekonomian menjadikan peningkat taraf hidup yang lebih baik.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata

Memasuki era yang serba digital ini pemanfaatan teknologi informasi didalam memajukan bidang pariwisata sangat diperlukan karena masyarakat

sekarang sudah sangat familiar dengan media sosial, media sosial tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat sekarang. Teknologi ini sudah banyak diadopsi oleh kalangan pemerintahan, pendidikan, bisnis dan lainnya sebagai sarana promosi, desiminasi informasi dan transaksi, oleh karena itu muncul istilah e-government, e-learning, e-business, e-commere dan lainnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi

a. Faktor Pendukung

Berikut ini kesimpulan dari masing-masing faktor pendukung dalam Implementasi kebijakan Pengembangan Pariwisata:

1) Keterlibatan semua pihak khususnya para agen pelaksana

Dinas pariwisata telah merangkul semua elemen masyarakat agar ikut andil dalam pelaksanaan program-program pariwisata, Adanya keterlibatan tersebut menjadikan seluruh elemen yang terdapat di dinas maupun diluar mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Selanjutnya dalam upaya untuk memberikan dukungan untuk memaksimalkan potensi daerah sehingga seluruh elemen yang terdapat di instansi dapat diselesaikan secara maksimal.

2) Antusiasme Masyarakat

Adanya antusiasme masyarakat menjadi dukungan secara maksimal sehingga program yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga program-program yang ditetapkan oleh dinas mampu dimaksmalkan dalam pencapaiannya. Masyarakat menjadi daya dorong yang tinggi atas segala bentuk program yang telah ditetapkan sehingga instansi mampu

memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah. Bentuk-bentuk dukungan masyarakat yaitu berupa dukungan masyarakat untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan oleh dinas sebagai upaya memaksimalkan potensi wisata daerah.

3) Adanya Buku Rencana Strategis

Dengan adanya buku pedoman Renstra tersebut maka secara tidak langsung membantu pemerintah daerah dalam menjalankan program implementasi kebijakan. Program implementasi tersebut terkait erat dengan upaya dinas dalam penyusunan setiap ketentuan atau kebijakan yang akan ditetapkan. Kebijakan yang tertuang di Renstra yang secara lengkap akan memberikan jaminan bahwa program telah disusun secara sistematis sehingga memberikan dukungan terkait dengan upaya pelaksanaan kebijakan yang akan dilakukan. Adanya upaya dari dinas untuk menyusun pedoman Renstra sehingga upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki daerah menjadikan upaya dinas lebih maksimal dalam menjalankan program-program yang telah ditetapkan.

b. Faktor Penghambat

Lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata disini menjadikan wisatawan kurang memiliki minat untuk mengunjungi suatu tempat wisata. Upaya pengelolaan selalu menjadi faktor penentu atas keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga program yang ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Upaya dari dinas terkait dan para *stake holder* harus jeli dalam membenahi infrastruktur

dan sarana yang mendukung agar obyek wisata terlihat menarik untuk dikunjungi. selain itu ada faktor yang menjadi penghambat lemahnya pengelolaan destinasi pariwisata anantara lain kurangnya promosi atau sosialisasi kepada publik. Karena kedua faktor ini menjadi tolok ukur keberhasilan suatu pengelolaan pariwisata.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa infrastruktur yang dimiliki suatu tempat wisata sehingga memberikan daya tarik terhadap wisatawan. Ketertarikan seorang wisatawan terhadap suatu tempat wisata terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga jaminan atas kepuasan wisatawan dapat terwujud secara maksimal.

B. Saran

Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi, untuk itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

1. Pemerintah daerah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu meningkatkan perbaikan-perbaikan potensi wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan memperbaiki infrastruktur dan akses menuju obyek wisata sehingga kemudahan proses pencapaian lokasi wisata.
2. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan kesadaran masyarakat disekitar obyek wisata dan pengelola obyek wisata sehingga dapat mendukung program-program wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Bentuk peningkatan kesadaran tersebut yaitu dengan memberikan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi.

3. Peningkatan kemampuan bahasa asing dan pengetahuan tentang obyek wisata dan daya tarik wisata bagi para pemandu wisata. Upaya tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa potensi wisata dapat terekspos dengan maksimal sehingga mendukung program-program pemerintah daerah terkait dengan upaya pengembangan potensi wisata di Kabupaten Banyuwangi.

